

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM USAHA MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

(Studi Kasus Badan Usaha Milik Desa Di Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur)

Dr. Hadiwiyono¹, M.Si Adi Roy Pandang²

^{1,2}Administrasi Publik

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang

ABSTRAK

Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Oleh sebab itu di wilayah Jawa Timur, terkhususnya Pemerintah Desa Landungsari, Kecamatan Dau menyadari bahwa Badan Usaha Milik Desa Landungsari baik dan tentunya harus dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan Kualitas Hidup sosial masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya implementasi program pendirian Badan Usaha milik desa dalam meningkatkan kualitas hidup sosial masyarakat, Untuk mengetahui siapakah yang terlibat dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa dan Untuk mengetahui factor apa saja yang mempengaruhi implementasi program pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kualitas hidup sosial masyarakat.

Implementasi dilaksanakan ketika sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Oleh karena itu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Usaha Kesejahteraan Meningkatkan Kualitas Hidup Sosial Masyarakat, maka untuk memperoleh data, teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi, maka peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Berdasarkan Hasil Penelitian di Desa Landungsari Mengenai Implementasi Kebijakan Program Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Usaha Kesejahteraan Meningkatkan Kualitas Hidup Sosial Masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini Upaya Pemerintah Desa Landungsari sudah berjalan dengan baik dan maksimal, dikarenakan Pemerintah Desa Landungsari telah mengajak masyarakat untuk sama-sama bekerja dalam hal menjaga dan melindungi segala usaha yang telah dikelola oleh petugas Badan Usaha Milik Desa baik dalam hal usaha penyelenggaraan Unit Usaha Pasar, Unit Pertanian, Peternakan, Hum Industri, Pengelolaan Sampah, dan Unit Usaha Simpan Pinjam sebagai bentuk dalam pemberdayaan masyarakat desa agar masyarakat desa dapat menambah pendapatan atau pemasukan melalui program usaha pasar.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Badan Usaha Milik Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

Village is an administrative division in Indonesia under a sub-district headed by the Village Head. Therefore, in the East Java region, especially the Landungsari Village Government, Dau District realizes that Landungsari Village-Owned Enterprises are good and of course must be managed properly so as to improve the quality of social life of the community. The purpose of this study is to find out how the implementation of the village-owned enterprise establishment program in improving the quality of social life of the community, to find out who is involved in the establishment of a Village-Owned Enterprise and to find out what factors affect the implementation of the village-owned enterprise establishment program in improving the quality of social life of the community. Implementation is implemented when a policy is formulated with clear objectives. Therefore, to find out the Implementation of the Village Owned Business Entity Establishment Program Policy (Bumdes) in an Effort to Improve the Quality of Social Life of the Community, to obtain data, data collection techniques by conducting Interviews, Documentation, and Observation, researchers use the type of Descriptive research with a Qualitative approach. Based on the Results of Research in Landungsari Village Regarding the Implementation of the Policy for the Establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Program in an Effort to Improve the Quality of Social Life of the Community, it can be concluded that for now the efforts of the Landungsari Village Government have run well and optimally, because the Landungsari Village Government has invited the community to work together in terms of maintaining and protecting all businesses that have been managed by Business Entity officers

Village Owned both in terms of business implementation of Market Business Units, Agricultural Units, Livestock, Industrial Hum, Waste Management, and Savings and Loans Business Units as a form of empowering village communities so that rural communities can increase income or income through market business programs.

Keywords: Policy Implementation, Village-Owned Enterprises, Community Empowerment.

PENDAHULUAN

Desentralisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan rakyat / masyarakat adalah desa untuk wilayah pemerintah kabupaten oleh karenanya semua muara persoalan hidup rakyat ada di desa dengan demikian sudah semestinya pemerintah mulai dari tingkat pusat (sentralistik) provinsi konsentrasi dan kabupaten / kota (Desentralisasi) harus menitik beratkan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Keberadaan desa berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang desa atas dasar PP tersebut desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat atau dalam pengertian desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus warga dan komunitasnya.

Dalam usaha pembangunan perekonomian dan diperlakukan kebijakan program pembangunan yang secara sustainable atau berkelanjutan dapat menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat desa. Dalam hal ini kebijakan yang diambil dan ditetapkan menjadi kebijakan adalah mendirikan badan penggerak ekonomi desa dengan sebutan badan usaha milik desa atau disingkat bumdes yang diharapkan akan mampu menjadi penopang perekonomian khususnya bagi warga desa landungsari kecamatan dawu kabupaten Malang.

Berdasarkan kajian dan perhatian sebagaimana terurai di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik implementasi kebijakan program pendirian badan usaha milik desa atau bumdes dalam usaha meningkatkan kualitas hidup sosial ekonomi masyarakat dengan studi di desa landungsari kecamatan Dawung kabupaten Malang Jawa timur

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Upaya implementasi program pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kualitas hidup social ekonomi masyarakat, Siapakah aktor yang terlibat dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa, dan Faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi program pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kualitas hidup sosialmasyarakat.

Menfaat kegunaan penelitian ini adalah memberikan pengetahuan pelaksanaan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup sosial ekonomi masyarakat, dan dalam meningkatkan kualitas hidup sosial ekonomi dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau pertimbangan bagi penelitian yang sama pada waktu yang akan datang.

Mengutip pendapat Meter dan Horn (dalam Winarno, 2008) bahwa implementasi kebijakan public adalah serangkaian tindakan untuk menambah keputusan sehingga mencapai penambahan yang diinginkan. Sedangkan lester dan dan Stewart dalam Nastia (2014), kebijakan public adalah proses input dan output outcome atas keinginan yang hendak dicapai.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif mengingat objek dan fokus penelitian sangat naturalistik seperti :

1. Metode implementasi
2. Sistem implementasi
3. Aktor yang terlibat baik pemerintah maupun masyarakat
4. Faktor yang menghambat implementasi program yang telah

ditetapkan baik secara internal maupun eksternal

Sedangkan sumber data yang diperoleh adalah data yang bersifat primer yang digali dari informan dan juga fakta-fakta yang ada di fokus penelitian untuk data sekunder diperoleh dari data-data desa landungsari yang bersifat data monografi desa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari model dan sistem implementasi kebijakan penduduk di desa landungsari adalah bersifat top down button up artinya gagasan atau ide dasar dari program dicetuskan oleh kepala desa dan disosialisasikan pada masyarakat secara serentak masyarakat atau rakyat sangat mendukung program tersebut dengan demikian pendirian bumdes memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat

1. Implementasi Kebijakan Program Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Sosial ekonomi Masyarakat di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

2. Aktor yang terlibat dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa

a. Pemerintah

Pemerintah juga sebagai aktor yang mempunyai peranan penting dalam program pembentukan Badan Usaha Milik Desa untuk mengelola potensi atau kekayaan desa tersebut baik dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penataan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk mengelola potensi yang di miliki oleh desa tersebut untuk memberdayakan masyarakat desa tersebut. Dengan adanya Peran Pemerintah Desa tersebut maka sangatlah mempunyai nilai positif baik dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penataan, penilaian, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian dalam rangka memberdayakan masyarakat dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat tersebut, oleh sebab itu, Pemerintah desa dan perangkat desa juga harus mampu mengelola potensi yang dimiliki oleh desa tersebut demi meningkatkan kualitas Maka dari itu di perlukan pemerintah yang berprofesional yang mampu mengelola aset desa atau kekayaan yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Dengan adanya potensi yang dimiliki oleh desa tersebut maka pemerintah desa juga perlu untuk mendirikan yang namanya Badan Usaha Milik Desa tersebut guna meningkatkan pembangunan ekonomi desa.

b. Masyarakat Desa Landungsari

Masyarakat desa juga mempunyai peranan dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa. Dengan adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat desa juga merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran dari program usaha desa yang biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Desa yang biasa disingkat dengan BumDes. Adanya partisipasi masyarakat desa juga dalam program pendirian Badan Usaha Milik Desa dapat mengurangi beban pemerintah dalam proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Peran masyarakat juga sangat penting dalam program pendirian Badan Usaha Milik Desa.

3. Faktor yang menghambat implentasi program pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kualitas sosial masyarakat.

Faktor yang menghambat implentasi program pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kualitas sosial masyarakat, berdasarkan faktor internal maupun faktor eksternal.

1. Faktor internal

a. Sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan

faktor yang dapat menentukan berhasil atau tidak nya dalam program pembentukan Badan Usaha Milik Desa, oleh karena, maka dari itu dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kreatif yang mampu mengelola potensi atau aset yang dimiliki oleh desa tersebut. Dengan hadirnya Badan Usaha Milik Desa tersebut yang dibentuk oleh pemerintah tersebut yang telah pemerintah desa tersebut telah memberdayakan masyarakat desa guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa tersebut.

b. Sarana Prasarana

Sarana Prasarana merupakan faktor yang berperan penting dalam Badan Usaha Milik Desa. Oleh karena itu dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai baik gedung maupun peralatan tersebut maka tentu program usaha yang dilakukan oleh desa melalui Badan Usaha Milik Desa dapat mencapai hasil yang telah direncanakan dan dapat berjalan dengan baik dan lancar

2. Faktor eksternal

a. Perkembang Masyarakat Ke Era Modern

Pengembangan serta pengelolaan BUMdes yang tepat dan baik, merupakan kerangka bangun terwujudnya perekonomian desa yang demokratis, dengan kata lain memiliki dampak berkesesuaian dengan misi Masyarakat ASEAN yang mengharuskan masyarakat siap dan berdaulat dalam konsekuensi apapun. Sehingga tujuan dari terselenggaranya BUMDes sebagai lembaga perekonomian

masyarakat desa, dapat membawa pengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi nasional, dan pada akhirnya Indonesia berdaulat secara ekonomi yang siap menghadapi tantangan globalisasi dalam skala perekonomian regional maupun internasional.

b. Tradisi Budaya Dan Kemajuan Teknologi

Budaya merupakan hasil dan seni yang tercipta dan karsa dari masyarakat sejak dulu sampai sekarang dengan budaya sendiri dari masyarakat tidak bergantung pada alat tradisional yang serba manual sehingga dengan adanya budaya luar dapat meningkatkan pengetahuan dan lebih berpikir memutar otak untuk menemukan hal baru untuk bersaing dalam desa guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan menggunakan teknologi diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, dapat menemukan inovasi baru dan meningkatkan pelayanan pemasaran usaha ataupun produk lokal dalam memajukan usaha yang berdaya saing tinggi.

Peneliti juga berasumsi bahwa ketiga aktor harus bekerja sama dalam mengambil bagian untuk menciptakan kesepakatan dalam membangun Badan Usaha Milik Desa Landungsari demi meningkatkan kualitas hidup sosial masyarakat desa Landungsari tersebut. Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa Landungsari tidak terlepas dari aktor pemerintah sebagai pembuat kebijakan berdirinya Badan Usaha Milik Desa Landungsari serta aktor

masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa serta keterlibatan perwakilan masyarakat yang disebut sebagai BPD sebagai penyelenggara musyawarah desa, oleh sebab itu, semua aktor yang terlibat di dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup sosial masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas, maka adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Implementasi kebijakan program pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) dalam usaha Kesejahteraan meningkatkan kualitas hidup sosial masyarakat saat ini sudah berjalan dengan baik diantaranya Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, Pemberdayaan dan Pembinaan, Tanggap darurat Bencana, dan sudah sesuai dengan agenda yang ditentukan sebelumnya, dan berlandaskan pada regulasi yang sudah ditentukan dari awal oleh pemerintah daerah dan pemerintah Desa Landungsari. Kualitas hidup sosial masyarakat desa landungsari saat ini sudah tergolong baik hal ini didukung oleh beberapa aspek yaitu kepedulian sosial sudah sangat bagus yang terdiri dari bidang pembangunan, bidang sosialbudaya.
2. Faktor yang mendukung Implementasi kebijakan Program pendirian badan usaha milik desa (BUMdes) Dalam usaha kesejahteraan Meningkatkan Kualitas Hidup Sosial Masyarakat Desa Landungsari yaitu Proaktif dan dukungan dari masyarakat, Program pendirian badan usaha milik desa yang berkesinambungan dan terarah.

Sedangkan faktor yang menghambat yaitu masih ada sebagian masyarakat yang belum mendukung program yang dijalankan oleh pemerintah. Dari penelitian mengenai implementasi kebijakan program pendirian badan usahamilik desa (BUMdes) dalam usaha kesejahteraan meningkatkan Kualitas hidup sosial masyarakat ini dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a) Pengelola implementasi berkenaan dengan peningkatan Kualitas Hidup Sosial desa Landungsari sampai saat ini dapat berjalan dengan baik dan dapat terlaksana juga semaksimal mungkin, namun ada serangkaian proses legal yang perlu dijalani lagi, dan perlu ada bimbingan legal dalam hal ini, juga sebaiknya ada petunjuk dari pihak pemerintah desa itu sendiri.
- b) Demi menjaga keberlangsungan program pendirian badan usaha milik desa di desa Landungsari, perlu lebih diadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mendukung serta mendorong kemajuan serta peningkatan kehidupan sosial masyarakat Desa Landungsari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Solichin, 2015, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik, (Jakarta : PT Bumi Aksara)
- Adi, Emmanuel Nugraha Pratama, 2013, "Pengaruh Posisi dan Kinerja Keuangan serta Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan : Studi Empiris Pada Emiten Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", Skripsi (tidak

- dipublikasikan), Program Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata.
- Chikmawati, Zulifah. "Peran BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penguatan sumber daya manusia." *Jurnal Istiqro* 5.1 (2019): 101-113.
- Dr.Arifin Tahir, M.Si., 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah, Bandung, ALFABETA.
- Drijver dan Sajise dalam Sutrisno 2005 *Pemberdayaan masyarakat dan Upaya peningkatan nya dalam pengelolaan jaringan irigasi mendut, Universitas Diponegoro : Semarang*
- Edi Soeharto 2006 : 76, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat, Bandung : PT Refika Aditama*
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Eko Sutoro, 2004 *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat, APMD Press, Jogjakarta*.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Liony Wijayanti, Ihsannudin. 2013. *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*. *Jurnal Agriekonomika*
- Mardikanto 2013 *Pemberdayaan Masyarakat, Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Bandung : Penerbit Alfab*
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Tentang Pemberdayaan.
- Molengraaff dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Naditya, Rochyani, Suryono, Agus dan Rozikin, Mochamad. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang*). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.
- Nugroho, Riant. 2010. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kinerja Kebijakan*. Edisi Kelima, Revisi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pramata D.S, Gumilar Iwang. Maulina Ine. 2012. *Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional Pancing Ulur di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur*. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*. Fakultas Ilmu Kelautan. UNPAD
- Riant Nugroho. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rochmat Soemitro, 1979, *Dasar Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung.
- Rosana, Ellya. "Modernisasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 10.1 (2015): 67-82.
- Samodra Wibawa, 2011, *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis*, Cet.Ke-1, Jakarta: Intermedia
- Satia, Siti Ramlah, and Dwi Sadono. "Partisipasi dan Efektivitas Pengembangan Ekonomi Mikro Pinjaman Bergulir BUMDES di Desa Cilebut Barat Kabupaten Bogor." *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 2.6 (2018): 783-792.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Celeban Timur UH III/54B Yogyakarta.

- Suharto Edi. 2007. Paradigma Ilmu Kesejahteraan Sosial. [internet]. [diunduh tanggal 15 November 2014]. Dapat diunduh melalui: <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/UIINYogyaParadigmaKesos.pdf>.
- Sunarti E. 2012. Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB. Bogor [ID]: LPPM.
- Syahida, Agung, Bayu. 2014. Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat).
- Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Mengenai Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT)
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju.
- Wibawa, Samudra. 1990. Studi Implementasi Kebijakan Laporan Penelitian. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Widyastuti A. 2012. Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2008. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Universitas Negeri Semarang.
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita
- Yusuf, M., & Agustang, A. (2020). Dinamika Perubahan Sosial Ekonomi pada Masyarakat Kindang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, (2), 31-37